



MENDORONG KOLABORASI **RISET** **KEBIJAKAN** BERBASIS BUKTI DI KTI

MUH. YUSRAN LAITUPA
Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI

EKOSISTEM RISET DI KTI



Kurangnya visi bersama tentang pentingnya riset dalam menjawab permasalahan pembangunan



Perumusan kebijakan berbasis hasil riset atau bukti belum menjadi budaya



Tata kelola riset yang cenderung *business as usual*



Terbatasnya keterlibatan multipihak khususnya non pemerintah (CSO dan Swasta)

TANTANGAN TATA KELOLA RISET



Riset dilakukan sendiri-sendiri oleh lembaga penelitian, akademisi, LSM, pemerintah daerah



Hanya untuk keperluan riset saja belum sampai ke riset untuk kebijakan



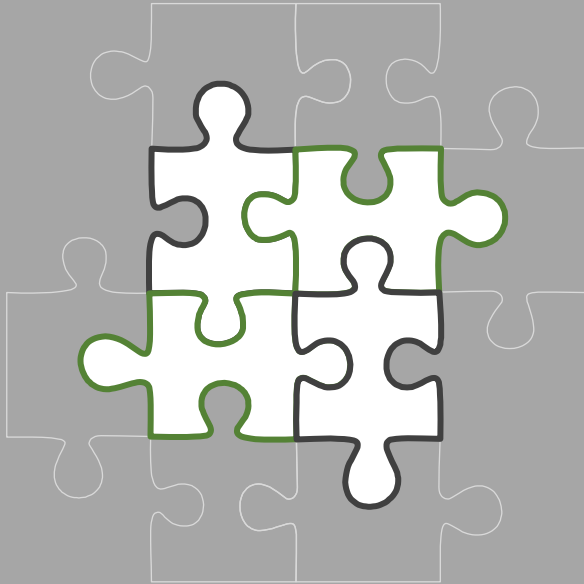
Tidak disesuaikan dengan prioritas penyelesaian masalah sosial dan ekonomi di masyarakat



SDM Peneliti tidak dikelola dengan baik



Kebijakan anggaran: Alokasi anggaran riset terbatas pada pemerintah daerah



INOVASI KAJIAN KOLABORASI DI SULAWESI SELATAN

BAPPELITBANGDA) Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI melaksanakan pilot program kebijakan berbasis bukti dengan dukungan *Knowledge Sector Initiative* (KSI)

Pilot ini ingin menunjukkan suatu siklus penyusunan kebijakan berbasis bukti, di mana suatu agenda kebijakan prioritas daerah akan didukung melalui sebuah kajian terapan.

Diawali dengan proses *agenda setting* melalui serangkaian pertemuan multipihak untuk mengidentifikasi isu prioritas, menyepakati topik kajian dan pendekatan pelaksanaan kajian.

Diskusi multipihak menyepakati pentingnya kebijakan tata kelola pengembangan komoditas yang disusun berdasarkan hasil kajian rantai nilai dari hulu hingga hilir dan memilih Sutra yang merupakan salah satu komoditas strategis yang menjadi prioritas Pemprov Sulawesi Selatan dengan pendekatan kajian kolaborasi.

MENGAPA KAJIAN KOLABORASI?



Postur kajian membutuhkan keahlian multidisiplin ilmu – kepakaran dari pemerintah, LSM, dan akademisi



Transfer pengetahuan dan keahlian



Proses kajian kolaborasi berdasarkan kepakaran memudahkan pelaksanaan kajian dan hasilnya kaya/komprehensif (multi perspektif)



Ujicoba inovasi model kajian kolaborasi



Dimungkinkan oleh regulasi: Permendagri No 17 tahun 2016 tentang Kelitbangan



AGENDA SETTING

- Serangkaian pertemuan multipihak
- Mengidentifikasi isu prioritas, menyepakati topik kajian dan pendekatan pelaksanaan kajian.



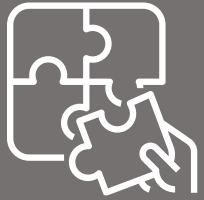
PELAKSANAAN KAJIAN

- Mengikuti Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Mengadopsi kelengkapan struktur tim: Tim Persiapan, Tim Pengawas, Tim Pelaksana, dan Tim Pengendali Mutu (TPM).
- Pendekatan baru: Tim Pelaksana Kajian dan TPM menggunakan pendekatan kolaborasi dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi dan LSM, yang bertujuan untuk memastikan kualitas proses dan hasil kajian.

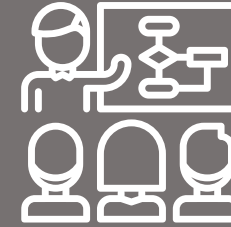


FORMULASI KEBIJAKAN

- Rekomendasi Kebijakan, Policy Paper berbasis hasil kajian
- Advokasi kebijakan ke pemerintah daerah – OPD terkait
- Proses penyusunan Kebijakan (Peraturan Gubernur)
- Pengesahan kebijakan



Sebagai *connector*,
aligner, *amplifier*



Terlibat sejak *agenda setting* (memfasilitasi forum multi pihak)

PERAN INTERMEDIARY



Berperan penting dalam memastikan proses pelaksanaan kajian mulai dari persiapan, pelaksanaan kajian, diseminasi hasil kajian, hingga proses tindak lanjut rekomendasi kajian – formulasi kebijakan.



Bersama-sama dengan bidang Litbang BAPPELITBANGDA menyiapkan tim: Tim persiapan, Tim pelaksana kajian, Tim Pengendali Mutu (TPM) dan menghubungkan tim tersebut dalam pelaksanaan kajian



TERIMA KASIH